

LAB 45 — TELAAH KEBIJAKAN

No. 012 - 30 Mei 2025

Telaah Kebijakan LAB 45 adalah wadah yang dirancang untuk menyampaikan pandangan kritis dan analisis terkini dari para peneliti serta analisis kebijakan terkait berbagai isu strategis seputar politik keamanan, ekonomi politik, politik media, dan gender. Platform ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam sekaligus menawarkan gagasan inovatif dalam menghadapi tantangan lokal ataupun global. Pendapat yang tercantum dalam setiap komentar merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak merefleksikan posisi resmi LAB 45. Jika Anda memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi tim kami melalui lab45@lab45.id.



Diskursus Historis PRRI Permesta

Dalam kancah sejarah yang tak pernah usai diperbincangkan, di mana setiap konstruksi menuntut dekonstruksi dan setiap “kebenaran” pada masa lampau senantiasa mengundang peninjauan kembali, gagasan untuk menafsir ulang narasi nasional oleh Kementerian Kebudayaan justru kian menggedor kesadaran kita: adalah sebuah keharusan bagi kita untuk terus mengamati dan, lebih jauh lagi, memperbolehkan aneka tafsir terhadap episode-episode krusial bangsa, termasuk di dalamnya peristiwa PRRI/Permesta sebagai salah satu peristiwa penting, kompleks dan berlapis maknanya. Tafsir sejarah, sejatinya, tak boleh menjadi entitas tunggal, apalagi direproduksi secara monolitik oleh rezim penguasa, karena sejarah yang demikian adalah sejarah yang mati, yang tercekam oleh kekuasaan, dan bukan refleksi jujur dari perjalanan suatu bangsa.

Peristiwa PRRI/Permesta (1957–1961) merupakan salah satu episode penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, yang mencerminkan kompleksitas hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, diperdalam oleh krisis ekonomi nasional dan dinamika global Perang Dingin. Konflik ini memunculkan interpretasi sejarah yang saling bersaing, dari narasi pemberontakan separatis hingga perjuangan otonomi daerah, dengan perspektif yang berbeda tentang peran Prof. Sumitro Djojohadikusumo dan Presiden Soekarno. Tulisan ini berusaha memahami bagaimana visi Sumitro dan Soekarno, dalam konteks ekonomi yang rapuh, membentuk narasi sejarah yang beragam, yang membentuk diskursus kebangsaan yang kompleks.

Kondisi ekonomi Indonesia pada pertengahan 1950-an menjadi katalis utama ketegangan yang memicu PRRI/Permesta. Pasca-kemerdekaan, Indonesia mewarisi struktur ekonomi kolonial yang bergantung pada ekspor komoditas seperti minyak, karet, timah, dan kopra. Pada 1956, ekspor menyumbang 20% Produk Domestik Bruto (PDB) (Booth 1996), dengan Sumatera menyumbang melalui minyak dan karet, serta Sulawesi melalui kopra. Namun, pendapatan ini sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan di Jawa, pusat administrasi, sehingga meninggalkan daerah penghasil untuk pembangunan lokal. Inflasi melonjak dari 35% pada 1955 menjadi



Andi Widjajanto
Penasihat Senior,
Laboratorium Indonesia
2045



**Jaleswari
Pramodhawardani**
Kepala,
Laboratorium Indonesia
2045

54,9% pada 1957, didorong oleh defisit anggaran sebesar -6,5% terhadap PDB pada 1958 (Woo dan Nasution 1989), yang terserap untuk operasi militer di Irian Barat dan proyek infrastruktur nasional seperti Monumen Nasional. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah dari Rp11,4 pada 1952 menjadi sekitar Rp22,7-78,1 pada 1957.¹ Cadangan devisa menyusut dari \$226,5 juta pada 1955 menjadi \$185 juta pada 1957 (International Monetary Fund 2025), membatasi impor barang kebutuhan pokok seperti beras dan tekstil. Ketidakefisienan administrasi, terutama korupsi, memperumit stabilisasi ekonomi. Kebijakan ekonomi nasional yang beralih ke model terpimpin pada 1957, dengan fokus pada kontrol negara, tidak mampu mengatasi ketimpangan regional, yang menjadi pemicu utama konflik.

Ketegangan ekonomi ini memicu respons di daerah. Pada 20 Desember 1956, Kolonel Maludin Simbolon mendeklarasikan Dewan Banteng di Sumatera Utara, diikuti Dewan Gajah oleh Kolonel Ahmad Husein di Sumatera Barat dan Dewan Manguni oleh Kolonel Ventje Sumual di Sulawesi pada 1957. Pada 2 Maret 1957, Sumual memproklamasikan Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) di Makassar, menegaskan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sambil menuntut desentralisasi. Eskalasi terjadi pada 15 Februari 1958, ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) diproklamasikan di Padang, dengan Sjafruddin Prawiranegara sebagai presiden dan Sumitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Ekonomi. Deklarasi ini mendapat dukungan militer dan sipil, menandai puncak ketegangan pusat-daerah.

Memahami kompleksitas suatu peristiwa historis semacam PRRI/Permesta, dengan beragam aktor, motif, dan konsekuensi, menuntut suatu kehati-hatian dalam penyusunan narasi. Adalah suatu keniscayaan epistemologis untuk mengakui bahwa sejarah bukanlah sebuah monolit, melainkan suatu mozaik fragmen-fragmen pengalaman yang acap kali saling bergesekan. Namun, di tengah kecenderungan ini, muncul suatu gejala yang patut dicermati: kegelisahan akan interpretasi tunggal sejarah yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan.

Interpretasi tunggal acap kali menampilkan suatu kecenderungan hegemonik dalam konstruksi narasi sejarah nasional. Sejarah, dalam bingkai semacam ini, mirip dengan apa yang dikatakan Soedjatmoko, bahwa ia cenderung direduksi menjadi suatu garis lurus, tanpa tikungan, tanpa persimpangan, apalagi jurang-jurang kontradiksi. Dalam konteks PRRI/Permesta, narasi yang demikian rentan terhadap pengaburan realitas. Dimensi ekonomi yang menjadi akar masalah, aspirasi otonomi daerah yang tulus, atau bahkan dinamika lokal yang membentuk respons terhadap kebijakan pusat, berpotensi terpinggirkan, bahkan tereliminasi, demi menciptakan suatu koherensi semu yang sesuai dengan “kebenaran resmi”.

Praktik semacam ini, yang cenderung menihilkan pluralitas pengalaman dan perspektif, tidak hanya memiskinkan khazanah sejarah bangsa, tetapi juga berpotensi menciptakan disorientasi kolektif. Ketika suatu narasi tunggal dipaksakan, maka ruang bagi dialektika, bagi refleksi kritis, dan bagi pembelajaran dari masa lalu menjadi terhambat. Ini sama saja dengan membiarkan generasi mendatang tumbuh dalam suatu pemahaman sejarah yang steril, yang tak mampu mengendus aroma keringat dan air mata, apalagi darah yang mengalir dalam setiap episode krusial perjalanan bangsa. Bukankah justru dari kegaduhan, dari pergesekan interpretasi, dari pengakuan atas kompleksitas itulah, kita dapat merajut pemahaman yang lebih matang tentang siapa kita sebagai suatu

¹ Rentang nilai tukar pada tahun 1957 berdasarkan beberapa nilai tukar acuan, antara lain acuan ekspor produk utama: Rp22,7, acuan impor produk utama: Rp28,4–42,6, dan acuan impor produk lainnya: Rp56,8–78,1 (Woo dan Nasution 1989).

entitas bangsa? Mengapa harus ada kekhawatiran akan narasi tandingan, jika memang sejarah itu sendiri yang bicara, dengan segala lapisan ironi dan paradoksnya?

Pemerintah pusat di bawah Soekarno memandang PRRI/Permesta sebagai ancaman terhadap integritas nasional, memicu respons militer yang signifikan. Operasi dimulai dengan serangan udara oleh Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) pada akhir Februari 1958, menargetkan pangkalan di Padang, Bukittinggi, dan Manado untuk melemahkan armada pemberontak, yang memiliki sekitar 15 pesawat B-26 dan P-51 Mustang. Pada 22 Februari 1958, dua B-25 Mitchell menyerang stasiun radio di Manado, yang justru meningkatkan dukungan lokal terhadap Permesta, dengan sekitar 2.000 mantan anggota KNIL bergabung. Operasi Nunusaku pada 15 Mei 1958, menggunakan lima P-51, empat B-25, dan satu PBY Catalina, menyerang pangkalan di Mapanget dan Kalawiran, menghancurkan sebagian besar pesawat pemberontak. Operasi Jakarta pada 26 April 1958 menargetkan pangkalan di Morotai dan Palu, dengan hasil parsial. Operasi Mena pada Mei 1958 merebut Halmahera, dengan Morotai dikuasai pada 20 Mei 1958. Operasi Sapta Marga, dimulai pertengahan Mei 1958, melibatkan 16 batalion untuk mengamankan Gorontalo, Sangihe, Talaud, dan Manado, yang direbut pada 24 Juni 1958. Di Sumatera, Operasi Merdeka, dipimpin Letnan Kolonel Rukminto Hendradiningrat pada April 1958, menekan PRRI hingga awal 1960 melalui serangan amfibi dan udara. Operasi ini menghasilkan korban besar: 22.174 tewas, 4.360 luka, dan 8.072 ditawan dari pihak PRRI/Permesta, serta 10.150 tewas dari TNI, polisi, dan warga sipil. Biaya operasi, mencapai 15% anggaran nasional pada 1958, memperberat defisit anggaran, mendorong inflasi hingga 30% pada 1959.

Berbeda dengan perspektif pemerintah pusat, Sumitro Djojohadikusumo memandang PRRI/Permesta sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi. Sebagai Menteri Ekonomi PRRI, ia mengusulkan desentralisasi untuk memungkinkan daerah mengelola sumber daya seperti minyak (30% ekspor), karet (20%), dan kopra (10%), guna mendukung pembangunan regional dan mengatasi inflasi. Pendekatan ini kontras dengan kebijakan ekonomi terpimpin Soekarno, yang menekankan kontrol negara atas sektor strategis untuk pembangunan nasional. Keduanya bertujuan memperkuat Indonesia, namun melalui strategi berbeda: Soekarno melalui sentralisasi untuk menjaga integritas nasional, dan Sumitro melalui desentralisasi untuk redistribusi sumber daya.

Konteks global Perang Dingin memengaruhi dinamika konflik. Setelah kegagalan militer pada 1958, PRRI/Permesta beralih ke perang gerilya hingga 1960. Dukungan eksternal, ditunjukkan oleh penangkapan Allen Pope pada 18 Mei 1958, menunjukkan dimensi internasional. Sumitro, yang memandang pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai tantangan ekonomi, menjalin hubungan dengan pihak luar untuk mendukung visi PRRI. Soekarno mengadopsi posisi non-blok, menjalin hubungan dengan PKI dan blok Timur untuk mendanai kebutuhan nasional, termasuk pinjaman \$100 juta dari Uni Soviet pada 1956, di tengah defisit anggaran Rp3 miliar pada 1957. Kedua pendekatan mencerminkan strategi berbeda dalam menavigasi tekanan global.

Konflik ini meninggalkan dampak sosial signifikan. Pada Februari 1961, pemerintah menawarkan amnesti, dan tokoh seperti Ventje Sumual menyerah, menandai berakhirnya konflik bersenjata. Namun, dampaknya berlanjut di Sumatera dan Sulawesi, dengan penutupan institusi seperti Universitas Andalas dan tantangan sosial pasca-amnesti. Biaya operasi militer memperberat krisis ekonomi, meningkatkan tekanan pada anggaran dan masyarakat lokal.

Perdebatan historiografis tentang PRRI/Permesta menunjukkan keragaman interpretasi yang tajam. Narasi resmi era Soekarno dan Orde Baru, yang mendominasi hingga 1998, menggambarkan PRRI/Permesta sebagai pemberontakan separatistis yang mengancam

integritas nasional. Perspektif ini, sejalan dengan visi Soekarno, menekankan sentralisasi dan memandang dukungan eksternal, seperti keterlibatan CIA, sebagai bukti agenda disintegrasi. Narasi ini cenderung mengabaikan konteks ekonomi, seperti kontribusi 71% ekspor daerah dan inflasi 25% pada 1956, serta aspirasi otonomi. Sebaliknya, analisis akademik pasca-reformasi, seperti karya Aryasahab, memandang PRRI/Permesta sebagai perjuangan otonomi daerah, didorong oleh ketimpangan ekonomi. Perspektif ini sejalan dengan visi Sumitro, yang menekankan desentralisasi sebagai solusi, dan mengkritik narasi separatistis sebagai penyederhanaan yang mengaburkan akar konflik. Pendekatan berbasis ingatan kolektif, seperti dalam jurnal LPPM Unindra, menyoroti dampak sosial, termasuk trauma di Sumatera dan Sulawesi, serta dimensi kosmopolitan dari keterlibatan asing. Perspektif lokal, khususnya masyarakat Minang, memandang PRRI sebagai upaya melawan ketidakadilan ekonomi, meskipun narasi ini kurang mendapat tempat dalam sejarah resmi. Analisis buku teks, seperti studi Putri dkk. (2024), mempertajam debat dengan mengkritik narasi resmi yang mengabaikan konteks ekonomi dan aspirasi daerah, serta kecenderungan memihak perspektif pusat. Perdebatan ini mencerminkan ketegangan antara narasi nasional yang menekankan persatuan dan narasi daerah yang menyoroti ketimpangan, dengan masing-masing perspektif menawarkan wawasan unik tentang kompleksitas peristiwa.

Mungkin hal itu yang mengingatkan kita bahwa sejarah adalah suatu medan pertarungan interpretasi, sebuah arena di mana kuasa dan memori saling berkelindan. Ketika negara mencoba menggagas interpretasi tunggal, sesungguhnya ia sedang melakukan suatu upaya hegemonik untuk mengontrol memori kolektif. Ini adalah suatu reduksi sejarah yang berbahaya, seolah-olah pengalaman suatu bangsa dapat direkam dalam satu keping memori saja. Padahal, justru dalam setiap retakan, setiap fragmentasi, setiap sudut pandang yang berbeda, kita menemukan kekayaan dan kedalaman yang sesungguhnya dari masa lalu.

Analisis PRRI/Permesta menunjukkan kompleksitas hubungan antara faktor ekonomi, politik, dan sosial. Kondisi ekonomi, dengan inflasi tinggi, cadangan devisa yang menipis, dan ketimpangan regional, menjadi katalis utama. Operasi militer pemerintah, meskipun efektif, memperberat krisis ekonomi dan meninggalkan dampak sosial. Pendekatan Soekarno dan Sumitro mencerminkan strategi berbeda dalam menanggapi tantangan yang sama. Perdebatan historiografis yang tajam menegaskan perlunya pendekatan yang mempertimbangkan data ekonomi, kronologi, dan keragaman perspektif untuk memahami dinamika pusat-daerah. Pentingnya menjaga kajian sejarah yang beragam, tanpa interpretasi tunggal dari negara, terletak pada kemampuan untuk menghormati kompleksitas pengalaman kolektif bangsa. Interpretasi tunggal yang diberlakukan negara berisiko menyederhanakan narasi, mengabaikan perspektif daerah, dan meminimalkan dampak sosial seperti trauma masyarakat Minang atau Sulawesi. Kajian sejarah yang terbuka memungkinkan dialog antara narasi nasional dan lokal, mendorong pemahaman yang lebih inklusif tentang masa lalu, dan memberikan pelajaran untuk hubungan pusat-daerah yang lebih seimbang pada masa depan. Dengan mempertahankan keragaman interpretasi, sejarah PRRI/Permesta dapat terus menjadi diskursus kebanggaan yang matang. Dan bagi seorang sejarawan yang memahami betapa dinamisnya proses historiografi tersebut, munculnya narasi tunggal yang digagas oleh negara adalah suatu alarm. PRRI/Permesta adalah salah satu contoh bagaimana sejarah diperbolehkan untuk terus-menerus diperdebatkan, ditinjau ulang, dan diperkaya oleh beragam suara.

*Jalan Mabes Hankam No. T65, Bambu Apus, Cilangkap, DKI Jakarta 13890
Email: lab45@lab45.id | Telp: +62811452045*

*Silahkan hubungi tim editorial untuk pertanyaan melalui
lab45@lab45.id*

Bibliography:

Woo, Wing Thye, dan Anwar Nasution. 1989. "Political and Economic Instability, 1950-65." Dalam *Developing Country Debt and Economic Performance, Volume 3: Country Studies - Indonesia, Korea, Philippines, Turkey*, oleh Jeffrey D. Sachs dan Susan M Collins, 32-55. Chicago: University of Chicago Press.

International Monetary Fund. 2025. "Total Reserves excluding Gold for Indonesia [TRESEGIDM052N]." *FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis*. 30 Mei. Diakses 30 2025, 2025. <https://fred.stlouisfed.org/series/TRESEGIDM052N>.

Booth, Anne. 1996. "Growth and Stagnation in an Era of Nation-Building. Indonesian Economic Performance from 1950s to 1965." Dalam *Historical Foundations of a National Economy in Indonesia, 1890s-1990s*, oleh J. Thomas Lindblad (ed.), 401-23. Amsterdam.